Nurani: Jurnal Studi Agama dan Peradaban Spiritual
Volume: 1, Nomor: 4, (2026), Desember: 680 - 699
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Nurani/article/view/632
E-ISSN: 3124-9000

DIALEKTIKA INTEGRASI DAN DISINTEGRASI: DINAMIKA KEPEMIMPINAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN DALAM LINTASAN SEJARAH ISLAM AWAL

Ainun Zalsabila Utami[1], Elsa[2], Idrus L.[3]
Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: salsabilautamiainun@gmail.com[1*], elsarugayya@gmail.com[2], idruslatif.iainbone@gmail.com[3]

Info Artikel
Received: *12 Oktober 2026*
Revised : *24 Oktober 2026*
Accepted: *08 November 2026*
Published: *19 November 2026*

Keywords: *development of Islam, leadership, Uthman ibn Affan.*

Abstract
This study examines the leadership of Uthman ibn Affan, the third caliph, in the development of Islam, covering his role, policies, achievements, and the challenges of his reign (644–656 CE). It employs a qualitative method with a historical-analytical approach through a literature review of Islamic historical works, hadith, books, and scholarly journals. The findings show that Uthman's government developed along two interrelated poles. On the one hand, he continued territorial expansion by land and sea, built a naval force, granted wide authority to regional governors, regulated social and religious life, and, most importantly, unified the Qur'anic codices into a single standard text distributed to various regions to prevent disputes over recitation. On the other hand, territorial expansion and the delegation of power gave rise to accusations of nepotism, unequal management of wealth, and dissatisfaction in Egypt, Kufa, and Basra, which developed into an opposition movement, the siege of Uthman's house, his assassination in 656 CE, and the outbreak of the great fitna. The study concludes that Uthman's leadership was an important phase showing both major achievements and the challenge of maintaining unity and governance in an increasingly large and diverse society.

Kata Kunci*:* kepemimpinan, perkembangan Islam, Utsman bin Affan.

Abstrak
Penelitian ini mengkaji kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam perkembangan Islam, meliputi peran, kebijakan, pencapaian, dan tantangan selama masa pemerintahannya (644–656 M). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-analitis melalui studi kepustakaan terhadap kitab sejarah Islam, hadis, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan Utsman berlangsung dalam dua kutub yang saling berkaitan. Di satu sisi, Utsman melanjutkan perluasan wilayah melalui jalur darat dan laut, membangun armada laut, memberikan kewenangan luas kepada gubernur daerah, mengatur kehidupan sosial-keagamaan, dan yang terpenting menyatukan mushaf Al-Qur'an dalam satu standar yang disebarkan ke berbagai wilayah untuk mencegah perselisihan bacaan. Di sisi lain, perluasan wilayah dan pendelegasian kekuasaan memunculkan tuduhan nepotisme, ketimpangan pengelolaan kekayaan, serta ketidakpuasan di Mesir, Kufah, dan Basrah yang berkembang menjadi gerakan oposisi, pengepungan rumah Utsman, hingga terbunuhnya beliau pada 656 M dan pecahnya fitnah kubra. Kajian ini menyimpulkan bahwa

kepemimpinan Utsman merupakan fase penting yang memperlihatkan pencapaian besar sekaligus tantangan menjaga persatuan dan tata kelola pemerintahan pada masyarakat yang semakin luas dan beragam.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengatur pemerintahan, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjaga kehidupan agama dan kesejahteraan umat. Hal tersebut dapat dilihat dalam kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan memiliki peran penting dalam melanjutkan perkembangan Islam melalui berbagai kebijakan dalam bidang pemerintahan, keagamaan, sosial, dan perluasan wilayah. Sikap dermawan, kelembutan, serta perhatian Utsman terhadap kepentingan umat menjadi bagian dari karakter kepemimpinannya. Oleh karena itu, masa pemerintahan Utsman menjadi salah satu periode penting dalam sejarah perkembangan Islam (Iramadhania et al., 2024).

Selama kurang lebih dua belas tahun memimpin, Utsman bin Affan menghadapi masyarakat Islam yang semakin luas dan kompleks. Wilayah kekuasaan Islam terus berkembang, hubungan antarwilayah semakin luas, dan perluasan tersebut turut memperluas penyebaran ajaran Islam ke berbagai daerah. Salah satu kebijakan yang berpengaruh besar adalah penyatuan dan penyebaran mushaf Al-Qur'an standar untuk menjaga keseragaman bacaan di tengah umat yang berasal dari berbagai daerah (Black, 2006). Namun, perkembangan tersebut juga diikuti tantangan sosial dan politik, terutama kritik dan ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan pemerintahan yang kemudian berkembang menjadi konflik (Hayani et al., 2025; Mariyono, 2024).

Kajian mengenai kepemimpinan Utsman bin Affan penting karena memperlihatkan bahwa perkembangan Islam pada masa awal berlangsung bersamaan dengan tantangan yang harus dihadapi seorang pemimpin. Di satu sisi, perluasan wilayah, penyatuan mushaf, dan penataan pemerintahan mencerminkan kemajuan dalam bidang keagamaan, pemerintahan, sosial, dan pendidikan. Di sisi lain, bertambah luasnya wilayah dan meningkatnya jumlah umat membawa kritik, perbedaan kepentingan, serta konflik yang menunjukkan bahwa menjaga persatuan umat bukanlah hal yang mudah. Karena itu, kepemimpinan Utsman dapat dipahami sebagai rangkaian dialektis antara upaya integrasi dan faktor-faktor disintegrasi.

Berbagai kajian terdahulu telah membahas kebijakan pemerintahan, kodifikasi mushaf, dan konflik pada masa Utsman, umumnya secara terpisah (Dahlan, 2019; Sholikhah et al., 2020; Almusawa et al., 2026). Artikel ini berupaya menyatukannya dalam satu analisis yang menghubungkan kebijakan integratif Utsman dengan faktor-faktor yang kemudian memicu disintegrasi politik pada akhir masa pemerintahannya.

Artikel ini bertujuan memahami peran Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam melanjutkan dan mengembangkan kehidupan umat Islam; mengetahui kebijakan dan kontribusinya, terutama dalam penyatuan mushaf Al-Qur'an, perluasan wilayah, pemerintahan, serta kehidupan keagamaan dan sosial; serta memahami tantangan dan konflik yang muncul selama masa pemerintahannya beserta pengaruhnya terhadap perjalanan umat Islam setelah masa Utsman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis untuk mengkaji kepemimpinan Utsman bin Affan dalam perkembangan Islam. Pendekatan historis digunakan untuk memahami peristiwa pada masa pemerintahan Utsman serta melihat peran, kebijakan, pencapaian, dan tantangan yang dihadapinya sebagai khalifah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari tulisan ilmiah tanpa pengumpulan data lapangan. Sumber penelitian meliputi buku sejarah Islam, kitab yang membahas kehidupan dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin, hadis, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan.

Prosedur penelitian mengikuti empat tahapan metode sejarah. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pengumpulan sumber, baik sumber primer klasik seperti Tarikh ar-Rusul wa al-Muluk karya At-Tabari, Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir, dan hadis sahih riwayat Al-Bukhari tentang kodifikasi mushaf, maupun sumber sekunder berupa buku sejarah dan artikel jurnal terakreditasi. Sumber primer klasik tersebut ditelusuri melalui kutipan dan kajian dalam sumber sekunder. Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu pengujian keaslian riwayat (kritik eksternal) dan kritik internal atas objektivitas narasi politik awal Islam untuk menyaring distorsi sektarian. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu analisis kausalitas sosio-historis atas tuduhan nepotisme dan dinamika desentralisasi daerah taklukan baru dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber. Tahap keempat adalah historiografi, yaitu penyusunan narasi sejarah yang analitis, kronologis, dan kritis.

Data dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu kebijakan pemerintahan, penyatuan mushaf Al-Qur'an, perluasan wilayah Islam, perkembangan kehidupan keagamaan dan sosial, serta konflik pada akhir masa pemerintahan Utsman. Hasil analisis disusun secara sistematis

untuk menggambarkan kontribusi kepemimpinan Utsman bin Affan sekaligus tantangan yang muncul selama masa pemerintahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Suksesi dan Karakter Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan

1. Latar Belakang dan Biografi

Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abd Syams bin Abd Manaf. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu keluarga terpandang dari suku Quraisy. Utsman lahir di Makkah dan dikenal sebagai seorang saudagar yang memiliki kehidupan berkecukupan. Sejak sebelum masuk Islam, ia dikenal sebagai orang yang memiliki kedudukan baik di tengah masyarakat Quraisy. Utsman kemudian memeluk Islam setelah diajak oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan termasuk salah satu sahabat yang lebih awal menerima ajaran Islam. Setelah masuk Islam, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya meskipun mendapat tekanan dari keluarganya (Iramadhania et al., 2024).

Utsman juga dikenal sebagai salah satu sahabat yang ikut mengalami perjuangan pada masa awal perkembangan Islam. Ia bersama istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah saw., pernah melakukan hijrah ke Habasyah karena tekanan dari kaum Quraisy. Setelah itu, Utsman kembali dan ikut berhijrah ke Madinah. Pernikahannya dengan Ruqayyah dan kemudian dengan Ummu Kultsum, yang keduanya merupakan putri Rasulullah saw., membuat Utsman mendapat julukan Dzun Nurain, yang berarti "pemilik dua cahaya". Selain dikenal sebagai sahabat yang dekat dengan Rasulullah saw., Utsman juga dikenal memiliki sifat dermawan dan banyak menggunakan hartanya untuk membantu kepentingan umat Islam (Mariyono, 2024).

Utsman termasuk sahabat yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Ia dipercaya sebagai salah satu penulis wahyu dan termasuk dalam kelompok sahabat yang mendapat kabar gembira tentang surga. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman dipilih menjadi khalifah ketiga melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat. Ia memimpin umat Islam selama kurang lebih dua belas tahun, yaitu sejak 644 M sampai 656 M. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas dan kehidupan umat berkembang dalam berbagai bidang. (Ilhamni, 2017).

2. Suksesi melalui Majelis Syura

Menjelang wafatnya, Umar bin Khaththab tidak secara langsung menunjuk seseorang untuk menggantikannya sebagai khalifah. Saat itu Umar sedang dalam keadaan sakit setelah ditikam oleh

Abu Lu'lu'ah. Untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam menentukan pemimpin berikutnya, Umar membentuk majelis syura yang terdiri dari enam orang sahabat, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenam sahabat tersebut dipilih karena memiliki kedudukan penting di kalangan umat Islam dan termasuk orang-orang yang pernah mendapat kepercayaan dari Rasulullah saw. Umar menyerahkan urusan pemilihan kepada mereka dan menyatakan bahwa siapa pun yang memperoleh kesepakatan di antara mereka dapat menjadi khalifah setelahnya. Menurut Haekal (2008), pilihan Umar tersebut memiliki pertimbangan karena keenam tokoh itu dianggap memiliki pengalaman dan kedudukan yang cukup untuk memimpin umat, sedangkan kaum Anshar maupun kabilah Arab lainnya tidak termasuk dalam majelis tersebut (Haekal, 2008).

Pembentukan majelis syura tersebut juga tidak terlepas dari kekhawatiran umat Islam terhadap keadaan setelah wafatnya Umar. Berbeda dengan masa Abu Bakar yang masih menghadapi keadaan umat yang belum stabil, pada masa Umar wilayah Islam telah berkembang luas dan pemerintahan menjadi lebih kuat. Karena itu, Umar tidak merasa perlu menunjuk seorang pengganti secara langsung. Namun, kaum Muslimin khawatir jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam menentukan pemimpin, perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi perselisihan. Setelah melalui proses musyawarah, Utsman bin Affan akhirnya terpilih sebagai khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khaththab. Pemilihan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah memiliki peranan dalam menentukan kepemimpinan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Terpilihnya Utsman kemudian menjadi awal dari masa pemerintahannya yang berlangsung sekitar dua belas tahun dan diwarnai dengan berbagai perkembangan sekaligus tantangan dalam kehidupan umat Islam (Syalabi, 2003).

3. Karakter dan Prinsip Kepemimpinan sebagai Khalifah

Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah terpilih melalui proses musyawarah yang melibatkan para sahabat. Ia memimpin umat Islam sekitar dua belas tahun. Pada masa awal pemerintahannya, Utsman melanjutkan berbagai sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh Umar bin Khaththab, sekaligus melakukan beberapa kebijakan baru sesuai dengan perkembangan masyarakat Islam. Kepemimpinannya dikenal memiliki pendekatan yang lembut dan mengutamakan musyawarah dalam menghadapi persoalan umat. Di bidang pemerintahan, ia melakukan pengaturan terhadap wilayah kekuasaan yang semakin luas, memperkuat administrasi, serta melakukan berbagai pembangunan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Pada masa pemerintahannya juga terjadi perluasan wilayah Islam ke beberapa daerah, sehingga penyebaran Islam semakin luas. Selain itu,

Utsman memberikan perhatian terhadap penguatan pertahanan, termasuk pembentukan armada laut yang berperan dalam menghadapi kekuatan Romawi di wilayah sekitar Laut Tengah (Hasibuan, 2018; Dahlan, 2019).

Setelah Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah, salah satu persoalan yang harus segera ia hadapi adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Umar. Sebelumnya, Ubaidullah membunuh Hurmuzan, Jufainah, dan seorang anak perempuan Abu Lu'lu'ah yang masih kecil. Peristiwa tersebut terjadi setelah Umar bin Khaththab wafat akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Ketika Utsman mulai menjalankan tugas sebagai khalifah, persoalan tersebut menjadi salah satu perkara yang harus diselesaikan. Keadaan ini cukup sulit karena di satu sisi terdapat tuntutan agar pelaku mendapatkan hukuman atas perbuatannya, sedangkan di sisi lain masyarakat masih berada dalam suasana duka setelah wafatnya Umar. Sebagian kaum Muslimin merasa bahwa sangat berat jika setelah Umar meninggal, anaknya juga harus menerima hukuman berat. Setelah mempertimbangkan keadaan tersebut, Utsman mengambil keputusan agar pihak keluarga korban diberikan diyat sebagai bentuk penyelesaian perkara. Bahkan, Utsman menggunakan hartanya sendiri untuk membayar diyat tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi persoalan politik dan hukum, Utsman berusaha mencari jalan yang dapat mengurangi pertentangan di tengah masyarakat serta mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak (Syalabi, 2003).

Dalam menjalankan pemerintahan, Utsman juga menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan umat. Ketika pertama kali dibaiat sebagai khalifah, ia menyampaikan pidato di hadapan masyarakat dan menjelaskan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar pemerintahannya. Utsman menyatakan bahwa kebijakannya akan tetap berpedoman kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., serta mengikuti cara pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Ia juga berusaha menjalankan pemerintahan dengan sikap lembut, santun, dan penuh pertimbangan. Namun, kelembutan tersebut bukan berarti mengabaikan ketegasan, sebab dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, seorang pemimpin tetap harus memberikan tindakan yang sesuai dengan ketentuan agama. Dengan prinsip tersebut, Utsman berusaha menjaga keseimbangan antara sikap bijaksana dalam menghadapi masyarakat dan ketegasan dalam menjalankan aturan (Ash-Shalaby, 2014).

a. Mempertahankan para pejabat pemerintahan

Salah satu kebijakan Utsman adalah mempertahankan sebagian pejabat yang telah bekerja pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab. Utsman tidak langsung mengganti seluruh pegawai pemerintahan setelah menjadi khalifah karena ia mempertimbangkan keberlanjutan sistem yang

sudah berjalan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan keinginannya untuk tetap mengikuti prinsip pemerintahan yang telah dibangun oleh Umar. Para gubernur, petugas keuangan, dan panglima perang tetap mendapatkan arahan agar menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan kepentingan umat. Dengan mempertahankan orang-orang yang dianggap mampu menjalankan tugasnya, pemerintahan dapat tetap berjalan tanpa harus mengalami perubahan besar secara tiba-tiba (Ash-Shalaby, 2014).

b. Menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pemerintahan

Utsman menegaskan bahwa pemerintahan harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Selain itu, ia juga berusaha mengikuti kebijakan yang telah dijalankan oleh Abu Bakar dan Umar selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Utsman tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang dapat dijalankan berdasarkan keinginan pribadi. Seorang khalifah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan ajaran Islam dan mempertimbangkan kepentingan umat. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi Utsman dalam menjalankan berbagai kebijakan selama masa pemerintahannya (Ash-Shalaby, 2014).

c. Memberikan ruang kepada umat untuk mengawasi khalifah

Pada masa Utsman, kekuasaan seorang khalifah tidak dipahami sebagai kekuasaan yang bebas tanpa batas. Pemimpin tetap memiliki tanggung jawab kepada Allah dan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Kebijakan seorang khalifah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Selain itu, umat juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemimpin apabila terdapat sesuatu yang dianggap tidak sesuai. Dengan demikian, kedudukan khalifah bukan sebagai penguasa yang dapat melakukan segala sesuatu sesuka hati, melainkan sebagai pemimpin yang menjalankan amanah untuk kepentingan umat (Ash-Shalaby, 2014).

d. Mengutamakan musyawarah

Musyawarah menjadi salah satu prinsip yang diperhatikan dalam pemerintahan Utsman bin Affan. Dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pemimpin perlu mempertimbangkan pendapat orang lain dan tidak hanya mengandalkan keputusan pribadi. Musyawarah juga menjadi sarana untuk mengetahui pandangan masyarakat dan mencari jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki hubungan dengan tanggung jawab sosial, sehingga seorang pemimpin perlu

mendengarkan dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya (Ash-Shalaby, 2014).

e. Menegakkan keadilan dan kesamaan

Utsman juga menempatkan keadilan dan persamaan sebagai bagian dari prinsip pemerintahannya. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa membedakan kedudukan seseorang. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin luas, prinsip tersebut penting untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan rakyat. Seorang pemimpin dituntut untuk tidak menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus memperhatikan kepentingan umat secara keseluruhan. Dengan adanya keadilan dan persamaan, kehidupan masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan lebih tertib dan mengurangi munculnya perselisihan.

f. Menjaga kemerdekaan masyarakat

Kebijakan pemerintahan Utsman juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kemerdekaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Kemerdekaan tersebut tidak berarti seseorang bebas melakukan apa saja, tetapi terdapat batas berupa ketentuan syariat dan kepentingan umum. Dalam kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, kebebasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik sekaligus tetap menjaga ketertiban sosial. Prinsip ini memperlihatkan adanya perhatian terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan pemerintahan.

g. Menjalankan amar ma'ruf nahi munkar

Utsman bin Affan juga memberikan perhatian terhadap penerapan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam penerapannya, terdapat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti sikap terhadap penggunaan pakaian tertentu, aturan bagi perempuan yang ingin melaksanakan umrah atau haji ketika masih berada dalam masa iddah, serta larangan terhadap beberapa bentuk permainan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan agama. Ia juga pernah memberikan arahan berkaitan dengan pemeliharaan dan penyembelihan burung merpati serta beberapa kebiasaan masyarakat lainnya. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pada masa Utsman tidak hanya mengatur persoalan politik dan pemerintahan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat (Ash-Shalaby, 2014).

Kebijakan Strategis: Pembangunan Armada Laut, Ekspansi Wilayah, dan Otonomi Daerah

1. *Ekspansi Wilayah di Darat dan Laut*

Pada masa enam tahun pertama pemerintahan Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam masih terus dilanjutkan sebagaimana yang telah dilakukan sejak masa Rasulullah saw., Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan Umar bin Khaththab. Selain memperluas daerah kekuasaan, Utsman juga berusaha mempertahankan wilayah yang sebelumnya telah berada di bawah pemerintahan Islam. Beberapa wilayah yang mendapat perhatian antara lain Khurasan dan Iskandariyah. Di wilayah timur, perlawanan dari Persia kembali muncul setelah beberapa waktu Utsman menjadi khalifah. Pasukan Muslim kemudian menghadapi berbagai perlawanan dan berhasil menguasai beberapa daerah seperti Kabul, Gaznah, Balkh, serta wilayah Turkistan bagian timur. Sementara itu, Iskandariyah yang sempat dikuasai umat Islam kembali mendapat serangan dari Romawi. Untuk menghadapi keadaan tersebut, pemerintah mengirimkan pasukan dalam jumlah besar sehingga pemberontakan dapat dikendalikan (Syalabi, 2003).

Perluasan wilayah pada masa Utsman tidak hanya berlangsung melalui jalur darat, tetapi juga berkembang ke wilayah laut. Untuk mendukung kegiatan tersebut, umat Islam mulai membangun dan memperkuat armada laut sebagai bagian dari pertahanan negara. Di wilayah Khurasan, beberapa daerah seperti Naisabur, Thus, dan Marw berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin. Di bagian utara, Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur Syam berhasil memperluas kekuasaan Islam hingga Asia Kecil dan mencapai Pulau Siprus pada tahun 28 H. Di wilayah barat, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh sebagai gubernur Mesir berhasil memperluas kekuasaan hingga Tripoli dan sebagian wilayah Afrika Utara. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa wilayah pemerintahan Islam pada masa Utsman semakin luas dan hubungan umat Islam dengan berbagai wilayah di luar Jazirah Arab semakin berkembang (Syalabi, 2003).

Perluasan wilayah tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah melemahnya kekuatan Persia dan Byzantium setelah menghadapi berbagai peperangan. Selain itu, penyebaran Islam ke berbagai daerah juga mendapat respons dari sebagian masyarakat setempat. Ada masyarakat yang melihat pemerintahan Islam sebagai sesuatu yang lebih dapat diterima dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Faktor lainnya adalah kondisi wilayah yang memiliki sumber daya dan posisi yang strategis. Dengan demikian, ekspansi pada masa Utsman bukan hanya berkaitan dengan penambahan wilayah kekuasaan, tetapi juga berkaitan dengan semakin luasnya hubungan politik, sosial, dan keagamaan umat Islam dengan masyarakat di berbagai daerah.

Perluasan tersebut mencakup wilayah seperti Khurasan, Kabul, Gaznah, Balkh, sebagian Asia

Kecil, hingga beberapa daerah di Afrika Utara. Utsman juga memberikan perhatian terhadap pertahanan, termasuk pengembangan kekuatan laut, karena wilayah Islam mulai berhadapan dengan kekuatan lain melalui jalur perairan. Masyarakat Muslim menjadi semakin tersebar, hubungan antara pusat pemerintahan di Madinah dan berbagai daerah semakin luas, dan penyebaran Islam menjangkau masyarakat dengan latar bahasa, budaya, dan kebiasaan yang berbeda (Dahlan, 2019).

2. *Otonomi Daerah dan Administrasi Pemerintahan*

Pada masa Utsman bin Affan, wilayah pemerintahan Islam telah berkembang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Keadaan tersebut membuat pengelolaan wilayah membutuhkan sistem pemerintahan daerah yang lebih teratur. Berbeda dengan masa Abu Bakar dan Umar yang menggunakan sistem pengelolaan wilayah melalui para amir dan wali, pada masa Utsman pembagian wilayah dilakukan secara lebih luas dengan beberapa daerah yang berada di bawah kepemimpinan gubernur atau amir. Pembagian ini bertujuan agar pemerintahan di daerah dapat berjalan lebih efektif karena setiap wilayah memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap urusan masyarakat dan pemerintahan setempat.

Beberapa wilayah yang memiliki pemerintahan daerah antara lain Makkah, Thaif, Shan'a, Jand, Bahrain, dan wilayah lainnya. Setiap daerah dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pemerintahan. Dengan adanya pembagian tersebut, pemerintah pusat di Madinah dapat mengatur wilayah yang luas melalui para gubernur yang bertanggung jawab terhadap daerah masing-masing. Sistem ini menjadi penting karena luasnya wilayah Islam membuat pemerintah pusat tidak mungkin menangani seluruh persoalan daerah secara langsung. Oleh karena itu, pengaturan pemerintahan daerah pada masa Utsman menjadi salah satu bentuk perkembangan administrasi dalam pemerintahan Islam.

Dalam bidang pemerintahan, Utsman juga berkontribusi terhadap pengelolaan wilayah Islam yang semakin besar. Pemerintahan yang memiliki wilayah luas membutuhkan pembagian tugas dan pengaturan daerah agar urusan masyarakat tidak seluruhnya bergantung pada pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Utsman menjalankan pemerintahan melalui para gubernur dan pejabat yang bertanggung jawab terhadap wilayah masing-masing. Selain itu, ia melanjutkan beberapa sistem pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya dan memberikan perhatian terhadap administrasi serta pengelolaan keuangan negara. Kajian mengenai pemerintahan Utsman menunjukkan bahwa aspek administratif, ekonomi, dan pengelolaan wilayah menjadi bagian dari perkembangan pemerintahan Islam pada masa tersebut. Dengan wilayah yang semakin luas, pengelolaan pemerintahan menjadi semakin kompleks sehingga diperlukan koordinasi antara khalifah dan para pejabat di daerah

(Akmalia, 2019; Sultanova, 2025).

3. *Kebijakan Sosial-Keagamaan*

Selain melakukan ekspansi wilayah dan menyeragamkan mushaf Al-Qur'an, Utsman bin Affan juga menerapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan pemerintahan. Beberapa kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak hanya berfokus pada perluasan wilayah, tetapi juga berusaha mengatur kehidupan masyarakat yang semakin berkembang.

a. Pengaturan kesejahteraan para muazin

Utsman menetapkan pemberian gaji secara rutin kepada para muazin. Kebijakan ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap orang-orang yang memiliki tugas dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Para muazin memiliki peran penting dalam mengumandangkan azan dan membantu mengingatkan masyarakat mengenai waktu salat. Dengan pemberian gaji, tugas tersebut menjadi bagian yang lebih teratur dalam sistem kehidupan masyarakat Islam.

b. Perubahan waktu penyampaian khutbah pada salat Id

Pada masa Utsman, khutbah dalam pelaksanaan salat Id didahulukan sebelum pelaksanaan salat. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk pengaturan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Selain itu, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Utsman melakukan beberapa penyesuaian dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat sesuai dengan keadaan pada masa kepemimpinannya.

c. Pengaturan pembayaran zakat

Utsman juga menyerahkan tanggung jawab pembayaran zakat kepada masing-masing pemilik harta. Dengan kebijakan tersebut, pembayaran zakat tidak sepenuhnya ditangani secara langsung oleh pemerintah seperti sebelumnya. Masyarakat diberikan tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan agama. Kebijakan ini berkaitan dengan semakin luasnya wilayah pemerintahan dan meningkatnya jumlah masyarakat Muslim yang harus dilayani.

d. Pembentukan Shurthah

Untuk menjaga keamanan masyarakat, Utsman membentuk Shurthah, yaitu pasukan atau petugas yang memiliki tugas menjaga keamanan kota. Pembentukan lembaga tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Semakin luasnya wilayah Islam dan semakin berkembangnya pusat-pusat perkotaan membuat pemerintah membutuhkan sistem keamanan yang lebih teratur.

e. Penambahan azan pada salat Jumat

Utsman juga menetapkan adanya tambahan azan pada hari Jumat. Azan tambahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan keadaan masyarakat yang semakin banyak dan aktivitas perdagangan yang semakin berkembang. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, diperlukan pemberitahuan yang lebih awal agar masyarakat dapat mengetahui dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Jumat. Dalam sumber tersebut disebutkan bahwa azan tambahan dilakukan di atas gedung atau tempat yang dikenal sebagai al-Zawraq.

Utsman juga memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sebagai pemimpin, ia tidak hanya berhadapan dengan persoalan perluasan wilayah, tetapi juga harus mengatur kehidupan masyarakat Muslim yang jumlahnya semakin banyak. Beberapa kebijakannya berkaitan dengan pengaturan kehidupan keagamaan, keamanan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai kewajiban umat. Perkembangan pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa Islam pada masa Utsman mulai menghadapi kebutuhan administrasi yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya. Di samping itu, perkembangan pendidikan Al-Qur'an dan hadis terus berlangsung melalui para sahabat dan pusat-pusat keilmuan di berbagai wilayah. Distribusi mushaf standar ke daerah-daerah juga membantu menciptakan dasar yang sama bagi kegiatan pembelajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, kontribusi Utsman dapat dilihat bukan hanya dalam bidang politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam penguatan kehidupan keagamaan dan proses penyebaran ilmu di tengah masyarakat Muslim (Ahmad et al., 2025).

Dengan demikian, perluasan wilayah, penataan pemerintahan daerah, penguatan pertahanan, dan hubungan antara pusat dengan daerah menunjukkan adanya perkembangan sistem pemerintahan Islam sekaligus upaya menjaga persatuan umat ketika masyarakat Muslim telah berkembang menjadi semakin luas dan beragam (Dahlan, 2019; Sultanova, 2025).

Unifikasi Teks Al-Qur’an: Analisis Sosio-Keagamaan Standardisasi Mushaf Utsmani

1. *Latar Belakang Perbedaan Qira’at*

Salah satu pencapaian terbesar Utsman bin Affan adalah upayanya menyeragamkan mushaf Al-Qur’an. Ketika wilayah Islam semakin luas, umat Muslim berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang bahasa dan kebiasaan bacaan yang berbeda. Perbedaan cara membaca atau qira’at mulai menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran karena dapat berkembang menjadi perselisihan di antara kaum Muslimin. Keadaan tersebut mendorong Utsman untuk menjaga kesatuan umat melalui penyusunan mushaf yang dapat dijadikan pedoman bersama. Kebijakan ini dikenal sebagai salah satu

jasa terbesar Utsman dalam perkembangan Islam karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan kitab suci umat Islam (Marki, 2024; Syalabi, 2003).

2. *Pembentukan Panitia, Penyalinan, dan Penyebaran Mushaf*

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Utsman membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit, dengan anggota Abdullah bin Zubair, Sa'id bin al-'Ash, dan Abdurrahman bin Harits (Marki, 2024). Panitia memeriksa dan menyalin kembali mushaf yang tersimpan di rumah Hafshah binti Umar, yaitu suhuf yang dihimpun pada masa Abu Bakar, dengan memperhatikan bacaan kaum Quraisy apabila terdapat perbedaan. Dalam prosesnya, mushaf tersebut dibandingkan dengan catatan Al-Qur'an yang dimiliki sejumlah sahabat. Setelah selesai, dibuat beberapa salinan yang dikirim ke pusat wilayah Islam, seperti Makkah, Madinah, Bashrah, Kufah, dan Syam. Salah satu salinan disimpan oleh Utsman dan dikenal sebagai Mushaf al-Imam, sedangkan catatan atau mushaf pribadi yang berbeda dari mushaf standar diperintahkan untuk disisihkan agar tidak menjadi sumber perselisihan. Penyebaran mushaf standar ini membuat umat di berbagai daerah memiliki pedoman yang sama dan mengurangi perbedaan penulisan (Harun et al., 2016).

3. *Dampak Sosio-Keagamaan: Persatuan Umat dan Keilmuan Al-Qur'an*

Kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan keagamaan umat Islam. Dengan mushaf standar, umat di berbagai wilayah memiliki rujukan yang sama dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Karena itu, penyatuan mushaf tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menyalin tulisan, tetapi juga sebagai kebijakan untuk menjaga kesatuan umat dan mencegah perbedaan bacaan berkembang menjadi konflik yang lebih besar (Madjid, 2019). Mushaf Utsmani kemudian menjadi dasar penting bagi penyebaran dan pembelajaran Al-Qur'an di berbagai wilayah serta menjaga keseragaman teks dari generasi ke generasi, sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan Al-Qur'an dan kesatuan umat (Madjid, 2019). Kajian mengenai Mushaf Utsmani juga menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan hanya persoalan penulisan, tetapi usaha menjaga persatuan di tengah semakin luasnya wilayah Islam (Sholikhah et al., 2020; Baharuddin et al., 2026).

Dekonstruksi Sosio-Politik Akhir Masa Khilafah: Isu Nepotisme, Disparitas Ekonomi Daerah, dan Tragedi Fitnah Kubra

Berbagai pencapaian tersebut berlangsung bersamaan dengan persoalan politik pada bagian akhir pemerintahan Utsman. Perluasan wilayah dan semakin besarnya pemerintahan membuat pengelolaan kepentingan masyarakat menjadi lebih rumit, sehingga pembahasan perlu melihat kedua

sisi secara bersama-sama: pencapaian dalam perkembangan wilayah, pemerintahan, pertahanan, dan pemeliharaan Al-Qur'an, serta tantangan dalam menjaga hubungan politik dan persatuan masyarakat yang semakin luas.

1. *Kritik terhadap Kebijakan dan Tuduhan Nepotisme*

Munculnya kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, persoalan politik mulai semakin rumit. Perluasan wilayah Islam yang sangat cepat membuat wilayah kekuasaan menjadi semakin luas dan masyarakat yang berada di bawah pemerintahan Islam semakin beragam. Keadaan tersebut membuat hubungan antara pemerintah pusat di Madinah dengan daerah-daerah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah tidak selalu berjalan dengan baik. Dari kondisi inilah muncul berbagai kritik terhadap kebijakan Utsman dan para pejabat yang menjalankan pemerintahan di daerah (Almusawa et al., 2026).

Tuduhan nepotisme terhadap Utsman. Salah satu persoalan yang paling banyak diperdebatkan adalah pengangkatan beberapa orang dari keluarga atau lingkungan Bani Umayyah untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sebagian masyarakat menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk keberpihakan kepada keluarga. Namun, persoalan ini tidak sepenuhnya sederhana, karena terdapat kajian yang menilai bahwa pengangkatan tersebut juga berkaitan dengan pertimbangan kepercayaan, kemampuan, dan kebutuhan politik pemerintahan. Dengan demikian, tuduhan nepotisme merupakan bagian dari konflik yang perlu dilihat berdasarkan kondisi politik pada masa itu, bukan hanya dari hubungan keluarga semata (Nugroho & Amril, 2026; Nasution, 2015).

2. *Ketidakpuasan Daerah, Administrasi, dan Pembagian Kekayaan*

Ketidakpuasan di beberapa daerah. Keresahan tidak hanya terjadi di Madinah, tetapi juga berkembang di beberapa pusat pemerintahan seperti Kufah, Basrah, dan Mesir. Masing-masing daerah memiliki persoalan sosial dan politik yang berbeda. Di Kufah, misalnya, terdapat ketegangan mengenai kedudukan kelompok masyarakat lama, pembagian tunjangan, serta pengelolaan pendapatan dari wilayah taklukan. Hal-hal tersebut kemudian memperkuat kelompok yang menentang kebijakan pemerintah pusat (Litvak, 2017).

Persoalan administrasi dan pembagian kekayaan. Selain masalah jabatan, muncul pula kritik mengenai pengelolaan harta negara, pembagian hasil wilayah yang telah ditaklukkan, serta kebijakan terhadap tanah dan pejabat daerah. Ketika sebagian masyarakat merasa bahwa pembagian kekayaan dan kebijakan pemerintah tidak lagi dirasakan secara adil, rasa tidak puas semakin berkembang. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa persoalan ekonomi dan administrasi daerah menjadi salah satu unsur yang memperkuat ketegangan politik pada masa tersebut (Nasution, 2015; Dahlan,

2019).

3. *Gerakan Oposisi, Pengepungan, dan Pilihan Jalan Damai*

Ketidakpuasan yang awalnya berupa kritik kemudian berkembang menjadi gerakan oposisi. Kelompok-kelompok dari Mesir, Kufah, dan Basrah mendatangi Madinah untuk menyampaikan tuntutan dan mempertanyakan kebijakan pemerintah (Hambaliana & Nurulloh, 2022). Situasi semakin sulit karena berbagai persoalan daerah mulai terhubung dengan persoalan legitimasi pemerintahan Utsman, dan penelitian sejarah menunjukkan bahwa Mesir, Kufah, dan Basrah menjadi pusat penting gerakan oposisi pada masa akhir kekhalifahan (Almusawa et al., 2026).

Tuntutan terhadap pemerintah. Kelompok yang datang ke Madinah membawa beberapa tuntutan, terutama mengenai pergantian pejabat yang mereka anggap tidak mampu menjalankan tugas dengan baik serta perubahan dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik pada masa itu tidak hanya berkaitan dengan pribadi Utsman, tetapi juga berhubungan dengan masalah administrasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pejabat yang memimpin wilayah mereka (Hambaliana & Nurulloh, 2022).

Ketegangan akhirnya mencapai tahap yang sangat serius ketika kelompok pemberontak datang ke Madinah dan mengepung kediaman Utsman sehingga situasi di Madinah menjadi tidak aman. Beberapa sahabat menawarkan diri untuk menjaga dan melindungi Utsman, tetapi ia tidak menginginkan pembelaan yang dapat menyebabkan pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Utsman memilih jalan damai dan tidak ingin keselamatan dirinya menjadi alasan pertikaian yang lebih luas di kalangan umat. Sikap ini sesuai dengan karakternya yang lembut dan cenderung menghindari kekerasan dalam menghadapi persoalan politik, meskipun upaya damai tersebut tidak berhasil menghentikan konflik yang sudah semakin besar (Al-Azizi, 2021).

4. *Terbunuhnya Utsman dan Fitnah Kubra*

Pengepungan berlangsung hingga keadaan tidak terkendali, dan para penentang akhirnya memasuki kediaman Utsman lalu membunuhnya pada tahun 35 H/656 M. Sejumlah sumber sejarah menyebutkan bahwa pada saat itu Utsman sedang membaca Al-Qur'an. Peristiwa ini mengakhiri masa kepemimpinannya dan menjadi salah satu titik balik paling penting dalam sejarah politik Islam, karena pembunuhan tersebut menjadi salah satu pemicu utama rangkaian konflik yang dikenal sebagai fitnah kubra, yang pada masa berikutnya berkaitan dengan Perang Jamal dan Perang Shiffin (Hinds, 2009).

Terbunuhnya Utsman tidak langsung menyelesaikan masalah politik. Peristiwa itu menimbulkan persoalan baru mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya dan

bagaimana proses penyelesaian hukumnya, sehingga perbedaan pandangan umat mengenai kepemimpinan semakin tajam. Karena itu, akhir pemerintahan Utsman tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya kepemimpinan seorang khalifah, tetapi juga sebagai awal periode baru yang penuh perselisihan politik dalam sejarah Islam.

Konflik pada masa Utsman menunjukkan bahwa semakin luasnya wilayah Islam membawa tantangan baru dalam mengatur masyarakat dan pemerintahan. Persoalan tidak lagi hanya berkaitan dengan perluasan wilayah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembagian sumber daya, pengangkatan pejabat, persaingan kelompok, serta tuntutan masyarakat terhadap pemimpin. Krisis tersebut dapat dipahami sebagai hasil berbagai persoalan yang saling berkaitan, bukan akibat satu kebijakan atau satu kelompok saja (Almusawa et al., 2026). Perpaduan antara kebijakan integratif dan faktor-faktor disintegrasi tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. *Matriks Analisis Kebijakan dan Konflik Pemerintahan Utsman bin Affan*

Ranah Kebijakan	Kebijakan Konkret yang Ditetapkan	Dampak Positif bagi Peradaban Islam	Tantangan / Friksi Politik yang Timbul
Keagamaan & Al-Qur'an	Pembentukan panitia Zaid bin Tsabit; unifikasi dialek Quraisy; distribusi Mushaf al-Imam ke kota utama.	Menyelamatkan umat dari perpecahan qira'at; menyediakan teks rujukan hukum dan pendidikan baku lintas wilayah.	Penolakan awal dari sebagian pemilik mushaf pribadi (misalnya mushaf Ibnu Mas'ud di Kufah).
Militer & Pertahanan	Pembangunan armada laut Islam pertama (al-ushtul al-bahri) oleh Mu'awiyah dan Abdullah bin Sa'ad.	Menaklukkan Siprus (28 H), mengamankan Laut Tengah, dan mematahkan hegemoni maritim Byzantium.	Beban biaya logistik tinggi dan kebutuhan kontrol perwira laut di wilayah perbatasan.
Administrasi Pemerintahan	Pendelegasian wewenang luas kepada gubernur daerah; pembentukan korps kepolisian (syurthah).	Efektivitas birokrasi di wilayah luas (Khurasan, Afrika Utara, Syam).	Munculnya tuduhan nepotisme atas dominasi kerabat Bani Umayyah di posisi strategis.

Ranah Kebijakan	Kebijakan Konkret yang Ditetapkan	Dampak Positif bagi Peradaban Islam	Tantangan / Friksi Politik yang Timbul
Sosial & Finansial	Gaji rutin bagi muazin; penambahan azan Jumat; desentralisasi taksiran zakat harta batin.	Penataan kehidupan ibadah perkotaan yang padat; kelonggaran ekonomi saudagar.	Kesenjangan ekonomi antara elit Quraisy dan pejuang suku pedalaman di Kufah dan Fustat.

Catatan: matriks merupakan sintesis penulis dari pembahasan pada subbab 1–4; kolom dampak dan friksi memuat interpretasi penulis.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab. Selama kurang lebih dua belas tahun memimpin, Utsman menghadapi kondisi umat Islam yang semakin berkembang, baik dari segi wilayah maupun jumlah masyarakatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, Utsman melanjutkan beberapa sistem yang telah dibangun sebelumnya sekaligus menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan keadaan pada masa pemerintahannya. Perluasan wilayah, pengelolaan pemerintahan, penguatan hubungan antarwilayah, serta perkembangan kekuatan militer menjadi bagian dari perkembangan Islam pada masa tersebut.

Salah satu sumbangan Utsman yang paling penting adalah penyatuan mushaf Al-Qur'an. Kebijakan tersebut dilakukan karena muncul perbedaan bacaan Al-Qur'an di berbagai wilayah Islam yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Dengan adanya mushaf standar yang kemudian disebarkan ke berbagai daerah, umat Islam memiliki pedoman yang sama dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Selain itu, perluasan wilayah pada masa Utsman turut memperluas penyebaran Islam dan mempertemukan umat Islam dengan berbagai masyarakat serta wilayah baru. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam pada masa Utsman tidak hanya berlangsung dalam bidang politik dan wilayah, tetapi juga dalam bidang keagamaan dan kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, masa pemerintahan Utsman juga menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks. Kritik terhadap kebijakan pemerintahan, ketidakpuasan terhadap beberapa pejabat, perbedaan kepentingan antarkelompok, serta persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kemudian berkembang menjadi konflik politik. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya dengan

pengepungan rumah Utsman dan berakhir dengan wafatnya beliau pada tahun 656 M. Peristiwa tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting yang memengaruhi perjalanan politik umat Islam setelahnya. Dengan demikian, kepemimpinan Utsman bin Affan dapat dipahami sebagai salah satu fase penting dalam sejarah Islam yang memperlihatkan adanya pencapaian besar dalam perkembangan umat, sekaligus menunjukkan bahwa semakin luasnya wilayah dan semakin beragamnya masyarakat juga membawa tantangan dalam menjaga persatuan dan kestabilan pemerintahan.

SARAN

Bagi pemimpin dan pengelola tata kelola publik masa kini, pengalaman kepemimpinan Utsman bin Affan menjadi bahan refleksi tentang pentingnya transparansi tata kelola birokrasi, penanganan kecemburuan sosial antardaerah, serta mitigasi provokasi politik di era keterbukaan informasi. Kepemimpinan yang lembut dan mengutamakan musyawarah perlu disertai pengawasan yang jelas terhadap pejabat daerah dan pembagian sumber daya yang dirasakan adil, agar kritik dapat disalurkan sebelum berkembang menjadi konflik.

Berdasarkan pembahasan mengenai kepemimpinan Utsman bin Affan, penulis menyarankan agar kajian tentang sejarah kepemimpinan Islam tidak hanya melihat keberhasilan yang dicapai, tetapi juga memperhatikan persoalan dan tantangan yang muncul pada masa tersebut. Sejarah Utsman bin Affan dapat dipelajari secara lebih mendalam dengan membandingkan berbagai sumber sejarah agar diperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai kebijakan, kontribusi, serta konflik yang terjadi selama pemerintahannya. Bagi mahasiswa, pembahasan mengenai kepemimpinan Utsman juga dapat dijadikan bahan untuk memahami pentingnya musyawarah, menjaga persatuan, mengelola pemerintahan, serta menghadapi perbedaan kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas salah satu aspek kepemimpinan Utsman secara lebih khusus, seperti penyatuan mushaf Al-Qur'an, perluasan wilayah, sistem pemerintahan, atau konflik politik pada akhir masa pemerintahannya, sehingga kajian mengenai kepemimpinan Utsman bin Affan dapat menjadi lebih mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, T. A., Dewi, E., & Athiyah. (2025). Institusionalisasi pendidikan Qur'an dan hadits pada era Khulafaur Rasyidin: Studi historis pembentukan kurikulum awal. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4).

Akmalia, R. (2019). Praktik manajemen masa Khalifah Utsman bin Affan. *Sabilarrasyad: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan, 3*(2).

Al-Azizi, A. S. (2021). *Utsman bin Affan ra.*. DIVA Press.

Al-Balazuri, ‘A. I. G. (t.t.). *Keutamaan kota Makka*. Pustaka Hidayah.

Al-Hamidi, A. A. (t.t.). *Tharikh Islam diurus wa ibr*. Darul Dakwa.

Ash-Shalaby, A. M. (2014). *Biografi Utsman bin Affan*. Beirut Publishing.

Baharuddin, M., Basri, H., & Miswar, A. (2026). The unification of the Utsmani mushaf: A historical-epistemological analysis of the standardization of the text of the Qur’an. *TAFASIR: Journal of Qur’anic Studies, 4*(1).

Dahlan, M. (2019). Kepemimpinan Usman bin Affan (kebijakan dan tantangan). *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah, 13*(1).

Dhaiman, A. N., & Hidayat, T. (2023). Manajemen kurikulum pendidikan masa kekhalifahan Abbasiyah. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies, 4*(1), 1–17. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i1.683

Haekal, M. H. (2008). *Utsman bin Affan*. Pustaka Litera Antarnusa.

Hasibuan, A. (2018). Kepemimpinan Usman bin Affan. *Hikmah, 12*(2).

Hidayat, T., Istianah, Aprilianti, T., Syafe’i, M., & Anwar, S. (2025). Sejarah peradaban Islam masa kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan radhiallahu anhu. *Tarikh: Journal of Islamic History and Civilization, 1*(1), 64–83.

Hitti, P. K. (2008). *History of the Arabs: Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam*. PT Serambi Ilmu Semesta.

Mahmudunnasir, S. (1991). *Islam: Konsepsi dan sejarahnya*. Remaja Rosdakarya.

Munir, M. (2023). Kepemimpinan Utsman bin Affan: Studi politik pemerintahan dan fiqih siyasah. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan, 1*(2), 40–50.

Muttaqin, Z. (2023). *Capaian peradaban Islam masa Utsman bin Affan* [Makalah presentasi]. Seminar Nasional UIN Raden Intan Lampung.

Nasution, H. (1986). *Teologi Islam: Aliran-aliran, sejarah, analisa, dan perbandingan*. Penerbit Universitas Indonesia.

Nurjanah, S. (2022). Perkembangan peradaban Islam masa Khulafaurrasyidin. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman, 7*(1), 25–33.

Shaban, M. A. (1993). *Sejarah Islam, penafsiran baru: Islamic history, A.D. 600–750 (A.H. 132): A new interpretation* (Machnun, Penerj.). Rajawali.

Sholikhah, L., Mardiati, & Rosyidah, L. (2020). Sejarah kodifikasi al-Qur'an mushaf Uthmani. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, 1*(2), 64–82.

Siti Maryam, dkk. (Ed.). (2003). *Sejarah peradaban Islam*. Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga.

Sultanova, N. (2025). The distinctive features of the governance during the Caliphate of Uthman Ibn Affan (May Allah be pleased with him). *Oriental Journal of History, Politics and Law, 5*(12), 181–190.

Syalabi, A. (2003). *Sejarah dan kebudayaan Islam I* (H. M. Yahya, Penerj.). PT Pustaka Al Husna Baru.

Wahyuni, S., Lestari, A. R., Mulyani, M., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., & Masripah. (2025). Sejarah kepemimpinan Utsman bin Affan: Analisis peranannya dalam perkembangan peradaban Islam. *Action Research Journal Indonesia*.

Yani, A., Nuraeni, & Artanto, M. F. D. (2023). Kontribusi Khalifah Usman bin Affan dalam perkembangan peradaban Islam. *Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya, 2*(1), 21–28.

Yatim, B. (2004). *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. PT RajaGrafindo Persada.